

**KOMUNIKASI POLITIK WINARTI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap *Incumbent*)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

Goby Rahmat Fauzi

NPM. 1431040076

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

**KOMUNIKASI POLITIK WINARTI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap *Incumbent*)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dalam Bidang Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

Goby Rahmat Fauzi

NPM. 1431040076

Jurusan Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. M. Sidi Ritauddin, M. Ag

Pembimbing II : Abdul Qohar, M. Si

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2018 M

KOMUNIKASI POLITIK WINARTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG

(Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap *Incumbent*)

ABSTRAK

Komunikasi politik adalah proses interaksi dimana dalam penyampaian mengandung unsur politik yang sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan melibatkan seorang tokoh, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan dengan tujuan tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini seperti apa komunikasi yang dilakukan Winarti dalam mengalahkan *incumbent*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk komunikasi politik Winarti dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemenangan Winarti di Kabupaten Tulang Bawang

Penelitian ini adalah penelitian (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Menurut sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode interview dan dokumentasi data yang diperoleh dan di analisis secara teliti.

Hasil penelitian ini adalah Winarti melakukan komunikasi dengan 3 unsur utama yaitu *Pertama*, komunikasi massa, Winarti menggunakan komunikasi massa dengan cara memasang iklan dengan menampilkan visi dan misi dengan dilengkapi foto di media massa, seperti koran, baliho, dan juga radio guna meningkatkan elektabilitas. *Kedua*, komunikasi organisasi, Winarti melakukan komunikasi kepada organisasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dengan melakukan komunikasi kepada organisasi memudahkan Winarti mendapat dukungan. *Ketiga*, komunikasi personal, Winarti melakukan blusukan kepada masyarakat, untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat dan mencermati langsung fakta yang ada di lapangan, sehingga tercipta program yang disebut 25 program pro rakyat.

Kemenangan Winarti disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelemahan *Incumbent* dalam melakukan strategi *promotion*, *price* dan *product* tidak dilakukan secara maksimal, sedangkan Winarti melakukan strategi *promotion*, *price* dan *product* secara maksimal, dengan mengedepankan visi dan misi yang disebut 25 program pro rakyat, selain itu faktor kemenangan Winarti dikarenakan sosok Winarti yang dikenal oleh masyarakat lebih merakyat di saat menjabat menjadi ketua DPRD. Faktor penghambat dalam kemenangan Winarti adalah masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan dalam melakukan komunikasi. Selain itu letak geografis juga menjadi hambatan karena akses dan medan yang ditempuh berbeda-beda.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol.H. EndroSuratminSukarame I Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Komunikasi Politik Winarti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang (Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap Incumbent)**
Nama Mahasiswa : **Goby Rahmat Fauzi**
Npm : **1431040076**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Sidi Ritauddin, M.Ag
NIP. 19655101929031003

Abdul Oohar, M.Si
NIP. 197103122005011005

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : JL. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KOMUNIKASI POLITIK WINARTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap Incumbent). Disusun oleh:
GOBY RAHMAT FAUZI, NPM. 1431040076, Jurusan PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (PPI) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama pada Hari/Tanggal: **Senin, 06 Agustus 2018**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Himyari Yusuf, M. Hum

Sekretaris : Angga Natalia, M.I.P

Penguji Utama : Drs. Effendi, M. Hum

Penguji Pendamping I : Dr. M. Sidi Rifauddin, M.Ag

Penguji Pendamping II: Abdul Qohar, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag
NIP. 195808231993031001

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru, kepada jalan yang di tunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran islam, dengan cara yang terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya; jangan hiraukan cemoohan, atau tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan kaum musyrikin, dan serahkan urusan mereka pada Allah karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu Dia-lah sendiri yang lebih mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah saja juga yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk.¹

(An-Nahl, ayat 125)

¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2011), Cet IV, Jilid. 6, h. 774.

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Suprayetno dan Ibundaku tercinta Asnawati, atas ketulusannya dalam mendidik akhlak, membesarkan jiwa dan membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam do'a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adik tersayang. Muhammad Gali Ramadhan, Anisa Nur Hayati, Anita Nur Azizah, yang selalu memberikan semangat serta senyuman yang membuat penulis terus bersemangat.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik kedepannya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 27 September 1996 di Kabupaten Tulang Bawang, anak pertama dari empat saudara dari pasangan Bapak Suprayetno dan Ibu Asnawati.

Pendidikan Dasar di SD N 01 Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP N 05 Banjar Agung lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA N 01 Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2014.

Setelah menerima bukti kelulusan pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Study Agama.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukoharjo 2, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Selama kuliah Penulis pernah aktif menjadi pengurus di beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) institut (UKM Bapinda dan UKM Permata Shalawat) dan menjadi pengurus IPNU Provinsi.

Penulis

Goby Rahmat Fauzi
NPM. 1431040076

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun bantuan materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag**, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Study Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Dr. Nadirsyah Hawari, M.A** selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan **Ibu Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak **Dr. M. Sidi Ritaudin, M.Ag**, selaku Pembimbing I dan **Bapak Abdul Qohar, M.Si**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Study Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Bani Wakidin dan Bani Adung yang telah memberikan dukungan, bantuan, arahan dari awal hingga menyelesaikan study S1 ini.
7. Terimakasih kepada Putri Uswatun Khasanah yang telah menemani dan memberi *support* sampai saat ini.
8. Sahabat-sahabat kosan Gojek tercinta, Suseno, Khafiqi Maulana Yusuf, Deni Ardiansyah, Deden Hadi Sasmita. S, Suheri, Wahyu setiawan, Dani Pranata, Khoirudin, Ahmad Islahud daroini, Alan Prabowo, M. Agus Sugiharto, dan Beni Yanto yang sudah seperti keluarga dan berjuang bersama-sama selama kurang lebih 4 tahun. Serta M. Fadli yang selalu memberi semangat, saran dan masukan.
9. Keluarga besar PPI B 2014, yang telah menjadi motivator-motivator dan pembimbing penulis di kelas selama perkuliahan dari awal hingga skripsi ini selesai.
10. Habib Kamal Bin Thohir Bin Syahab, guru yang terus menerus mengenalkan Rasalullah SAW dan yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan.
11. Keluarga Besar UKM Permata Shalawat, tempat belajar dan menimba ilmu serta berorganisasi, terkhusus kepada Ahmad Lathoiful Ihsan (Gus

Ican) selaku ketua umum pertama UKM Permata Shalawat dan seluruh Dewan Tertinggi Organisasi (DTO) UKM Permata Shalawat yang telah banyak memberi motivasi dan saran kepada penulis .

12. Sahabat-sahabat KKN kelompok 253.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Amin.

Skripsi dengan judul “Komunikasi Politik Winarti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Akhirnya penulis memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin

Bandar Lampung 17 Desember 2018

Penulis

Goby Rahmat Fauzi
NPM. 1431040076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Metode Penelitian	12
H. Tinjauan Pustaka.....	17

BAB II KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILUKADA

A. Komunikasi Politik	22
1. Pengertian Komunikasi Politik.....	22
2. Unsur-Unsur Komunikasi Politik.....	23
3. Fungsi Komunikasi Politik.....	32

4. Tujuan Komunikasi Politik	33
B. Pemilukada.....	36
1. Pengertian Pemilukada.....	36
2. Landasan Hukum Pemilukada.....	39
3. Sejarah Pemilukada Serentak	42

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DAN PEMILUKADA 2017

A. Sejarah Singkat Kabupaten Tulang Bawang.....	47
B. Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten Tulang Bawang.....	53
C. Profil Bupati Tulang Bawang	54
D. Hasil Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang	57

BAB IV BANGUNAN KOMUNIKASI POLITIK DAN FAKTOR KEMENANGAN

A. Bentuk Komunikasi Politik Winarti Kepada Masyarakat.....	63
1. Komunikasi Massa Winarti.....	63
2. Komunikasi Organisasi Winarti	66
3. Komunikasi Interpersonal Winarti	68
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat komunikasi Winarti.....	69
1. Faktor Pendukung	69
a) Pengaruh <i>Incumbent</i>	69
b) Figure Winarti	70
c) Bentuk Visi dan Misi	71
2. Faktor Penghambat	72
a) Masyarakat	72
b) Letak Geografis.....	73

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang	
Tahun 2014	52
Tabel 2. Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Tulang Bawang.....	53
Tabel 3. Biodata Winarti.....	54
Tabel 4. Riwayat Pendidikan Umum.....	55
Tabel 5. Pengalaman Birokrasi/Tugas.....	55
Tabel 6. Riwayat Organisasi.....	56
Tabel 7. Biodata Hendriwansyah.....	56
Tabel 8. Riwayat Pendidikan Umum.....	57
Tabel 9. Riwayat Organisasi.....	57
Tabel 10. Hasil Perolehan Suara Pemilu pada Kabupaten Tulang Bawang	
Tahun 2017	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam proposal skripsi ini adalah “**Komunikasi Politik Winarti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Tulang Bawang (studi kasus kemenangan Winarti terhadap *Incumbent*)**” untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan lebih mempermudah pemahaman juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang di kehendaki penulis.

Komunikasi politik menurut Steven Foster, adalah cara dan implikasi di mana politisi berusaha untuk mengkomunikasikan pesan mereka untuk pemilihan yang skeptis dan tidak terikat. Sedangkan menurut Damsar, komunikasi politik adalah proses pengalihan pesan (berupa data, fakta, informasi dan citra), yang mengandung suatu maksud atau arti, dari pengirim kepada penerima yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, kehidupan politik, pemerintah, Negara, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi (kekuasaan)¹

Menurut penulis komunikasi politik adalah komunikasi di mana dalam penyampaianya mengandung unsur politik yang sengaja di lakukan oleh komunikator terhadap mediator dengan melibatkan seseorang tokoh, atau

¹Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik* (Jakarta : Buku Kompas, 2005), h. 115

berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah dan kebijakan dengan tujuan tertentu. Adapun dalam hal ini komunikasi yang di maksudkan ialah sebuah interaksi antara Winarti kepada masyarakat Tulang Bawang dalam penyampaian komunikasi politik.

Winarti merupakan salah satu dari tiga calon Bupati yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penelitian ini Winarti menjadi objek yang menarik untuk di lakukan penelitian terkait komunikasi politik yang ia sampaikan.

Pemilukada merupakan agenda politik untuk menentukan format dan arah masadepan demokrasi Indonesia, melalui mekanisme partisipasi warga Negara secara langsung ke dalam politik praktis dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan mereka. Dengan kata lain pemilihan umum adalah wujud nyata keterlibatan warga dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu memilih pemimpin yang akan duduk menjadi kepala daerah.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan, yang terdiri dari 169 desa atau kelurahan.² Dari 15 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Winarti unggul di 8 kecamatan. Mengalahkan *incumbent* hanya unggul di 7 kecamatan.

Bedasarkan kejelasan judul di atas yang di maksud dengan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana bentuk dari komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada saat pemilukada dan faktor pendukung dan

²Nomor.net, “ Daftar Kecamatan Atau Distrik di Kabupaten Tulang Bawang”, http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=kecamatan-kodepos&daerah=kota-kabupaten&jobs=lampung&urut=asc=000111&sby=100000&no1=2&prov=kab.+Tulang+Bawang (di akses pada 10 maret 2018)

penghambat apa yang mempengaruhi Winarti dan dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilu.

B. Alasan memilih judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Penulis tertarik dengan permasalahan ini bahwa dalam sebuah teori menurut Marjani, mengatakan bahwa setiap calon yang akan maju dalam pemilu harus memiliki tiga modal yaitu: modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. *Incumbent* telah memiliki tiga modal tersebut, yang menarik dalam penelitian ini adalah Winarti dapat mengalahkan *Incumbent*. jika dilihat dari partai koalisi *incumbent* lebih unggul dibanding dengan Winarti. sehingga penulis tertarik untuk menelitinya.

2. Alasan Subjektif

Dari penelitian ini penulis bermaksud untuk mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama yaitu Jurusan Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang lazim di sebut dengan pemilukada. Baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati atau WaliKota dan Wakil Bupati atau Wakil WaliKota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah.

Pemilihan Kepala Daerah di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang di tunjuk untuk mengatur bentuk pemerintah sesuai dengan otonomi daerah dengan salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada secara langsung merupakan momentum besar dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.³

Pemilihan Bupati merupakan langkah politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan Kepala daerah. Legitimasi merupakan komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial.⁴ Menurut penulis pesta demokrasi sangat dapat di rasakan pada masa setelah lengsernya Presiden Soeharto. Sehingga masyarakat saat ini sangat gembira dengan adanya pemilihan Kepala daerah secara langsung yang mana

³ UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁴ Komaruddin Hidayat dan Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif), h.202-203

masyarakat dapat memilih Pemimpin atau Kepala daerahnya masing-masing tanpa adanya tekanan dari pemerintah yang bersifat otoriter.

Membahas tentang pemilukada berkaitan erat dengan sosok pemimpin. Pemimpin menurut Terry adalah agen perubahan, orang yang tindakannya mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi mereka.⁵ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah pemimpin adalah mereka yang di isyaratkan Qur'an sebagai 'Ulu al-Amr' atau mereka yang memerintah, pihak yang mesti di taati oleh umat Islam.⁶ Menurut penulis pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan.

Kehadiran pemimpin sangat di butuhkan dalam organisasi maupun Negara. Pemimpin merupakan barisan terdepan dalam mengarahkan sumber daya manusia, mengelola sumber daya organisasi lainnya, serta menetapkan visi, misi sasaran dan mengkomunikasikannya kepada semua anggota organisasi untuk di capai⁷. Dalam memilih pemimpin Ibnu Taimiyah memberikan syarat-syarat komplementer yaitu: keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal.⁸

Kesuksesan pemilukada sangat bergantung kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam program pemerintahan dan sebaliknya ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai langkah maju untuk membangun bangsa ini agar lebih baik, dan melalui pemilukada pun kita mengamankan cita-cita bangsa

⁵ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2015), h. 7

⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), h. 68

⁷ Op.cit.,h. 9

⁸ Op.cit.,

kita kepada orang yang memiliki tanggung jawab dan mampu mewakili suara rakyat. Hal ini tidak lepas dari seberapa besar rakyat mampu menjalankan amanat pemerintah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemilukada serentak tahun 2017 di ikuti oleh beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yang di selenggarakan oleh KPU Pusat. Provinsi Lampung juga ikut serta dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Ada lima Kabupaten di Provinsi Lampung yang mengikuti pemilukada. Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu yang mengikuti pemilukada serentak.⁹

Bedasarkan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 16 Februari 2017, Winarti memperoleh suara terbanyak dari masyarakat. Sehingga dapat di katakan Winarti yang memenangkan pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dapat di lihat berdasarkan suara yang di peroleh masing-masing calon. Di urutan pertama Winarti yang memperoleh jumlah suara sebanyak 93.689 atau 47.65%, dan pada urutan ke dua inkanben yang memeperoleh jumlah suara sebanyak

⁹ AdminKPU, "3 Pasangan Calon di Nyatakan Lolos", <http://KPU-tulangbawangkab.go.id/2016/10/3-pasangan-calon-dinyatakan-lolos/>(di akses pada 24 oktober 2016)

88.762 atau 45.14%, dan pada urutan ke tiga independen yang memperoleh suara sebanyak 14.174 atau 7.21%.¹⁰

Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Winarti dan unggul di 8 kecamatan, di antaranya Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kecamatan Rawa Jitu Timur, dan Kecamatan Rawa Pitu.

2 dari 3 calon Bupati tersebut memiliki partai yang mendukungnya, Winarti di dukung oleh partai PDI dan PAN, dan *Incumbent* di dukung oleh partai NasDem, PKS, Gerindra, Hanura, Demokrat, Golkar, PKB dan PPP sedangkan kandidat ke tiga adalah pasangan Independen. Jika di lihat dari partai pendukung *Incumbent* memiliki kemungkinan untuk menang sangat besar karena di dukung oleh 8 partai. Sedangkan Winarti hanya memiliki 2 partai pendukung.

Terdapat hal yang menarik dalam pemilu kada di Tulang Bawang bahawasannya *Incumbent* dapat terkalahkan dengan Winarti. Pada dasarnya pasangan *Incumbent* memiliki banyak keuntungan seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Iwan Satriawan dan Andi Saputra terdapat beberapa keuntungan lebih bagi pasangan *Incumbent* di banding dengan paslon lain. Pertama, keuntungan finansial. sejumlah keperluan (seperti biaya komunikasi, dengan konstituen, perjalanan biaya kantor dsb) bisa ditutupi dengan memakai anggaran yang telah disediakan oleh Negara sebagai kepala daerah.

¹⁰KPU Kabupaten Tulang Bawang 2017

Calon yang tengah memerintah punya kesempatan melakukan kampanye secara terus menerus sepanjang waktu. Posisi *Incumbent* juga memiliki peluang besar terpilih kembali tidak terlepas dari keuntungan yang di dapat oleh kepala daerah, baik keuntungan langsung maupun tidak langsung, ke untungan langsung yang di dapat oleh kepala daerah adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling di kenal pemilih. Sementara keuntungan tidal langsung yang di dapat oleh kepala daerah *incumbent* dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, mengunjungi rumah masyarakat hingga meresmikan sebuah proyek pembangunan dapat di bungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat.¹¹ Namun pada kali ini pasangan *Incumbent* tidak di berikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin kembali dalam periode selanjutnya. Hal ini menarik untuk di lakukan penelitian bahawasannya *Incumbent* yang pada dasarnya memiliki ke unggulan yang lebih namun pada kali ini dapat di kalahkan dengan Winarti.

Dalam proses politik, komunikasi politik sangat penting, salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik antara semuanya. Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain.

Dalam dunia politik di butuhkan juga komunikasi yang efektif dalam berpolitik. Karena kegiatan politik harus di landasi oleh kegiatan komunikasi untuk menyalurkan ide, gagasan dan tujuan dalam bidang-bidang penting

¹¹ Iwan Setiawan, Andi Saputra, *Faktor-Faktor Kemenangan Incumbent dalam PILKADA*, Jurnal KONSTITUSI, Vol, III, No 1, Juni 2010, h. 80-81

dalam Negara. Apabila seorang politikus tidak membicarakan tentang ide, gagasan dan tujuan dalam bidang-bidang penting dalam Negara, melainkan membicarakan tentang gaya hidupnya seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi dari kalangan selebriti, artinya ia sedang tidak berperan sebagai politisi. Komunikasi efektif merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dan komunikasi tersebut saling *feedback*.

Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau dimana saja manusia berada. Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian.

Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan Negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the sociopolitical sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan

infrastruktur yang bersifat interpendensi dalam ruang lingkup Negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespon sehingga mencapai saling pengertian dan di orientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Sehingga komunikasi politik dapat di simpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan di dalamnya pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Proses komunikasi politik di maknai sebagai proses penyampaian pesan.

Dari penjabaran masalah tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam Bagaimana bentuk dari komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada saat pemilu pada dan Faktor pendukung dan penghambat apa yang mempengaruhi Winarti dan dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang terpapar dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok studi yaitu:

1. Bagaimana bentuk dari komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada saat pemilu?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa yang mempengaruhi Winarti dan dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada saat pemilu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Winarti dan dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilu.

F. Manfaat Penelitian

Berikut tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi Akademis dan Praktis, adapun kegunaannya dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan menambah wawasan pada literatur-literatur ilmu politik khususnya komunikasi politik.
2. Dari penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan tentang komunikasi seorang sosok tokoh politik dalam membangun komunikasi politiknya menjelang pemilihan kepala daerah.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktor politik untuk mengetahui proses dan cara mengkampanyekan sosok dalam membangun komunikasi politik.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹² Untuk mencapai hal tersebut dalam sebuah penelitian di butuhkan metode yang sesuai. Hal ini di maksud agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang di harapkan. Metode penelitian yang di maksud yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Di lihat dari pelaksanaannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reeseacrh). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan (Field Reeseacrh), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹³ Sedangkan menurut M, Iqbal Hasan pnelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau responden¹⁴.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan.¹⁵ Jadi penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi

¹²Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta Bumi Aksara, 2001), h. 42

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h. 46.

¹⁴ M, Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghali Indonesia, 2002), h.38.

¹⁵ Prasatya Irwan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta : Setiawan Pers, 1999), h. 60

kelompok tertentu secara tepat. Menurut sumradi suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang untuk pecandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi politik Winarti dalam pemilukada Tulang Bawang.

2. Sumber Data

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti. Oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁷ Data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.¹⁸ Selain data primer merupakan data atau informasi asli yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya.

Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah Winarti yang terlibat langsung dalam proses pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang.

¹⁶Sumradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h.

¹⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta), h. 38

¹⁸ Syarifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 91

b. Data Sekunder

Data yang di ambil dan di peroleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, internet, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹⁹

Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jadi data ini berupa bahan kajian yang di gambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Dan dalam data ini sumber data yang di gunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah refrensi yang di gunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan peneliti baik yang berasal dari buku maupun internet seperti jurnal online dan artikel jurnal. Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, dimana bisa berupa lampiran pertanyaan dan foto.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan metode *interview*, dan metode dokumentasi.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. XII, 2000), h. 115

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara di gunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apa bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan interview yang di lakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang di maksud dalam interview terstruktur.²¹ Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara *snowballing* yaitu pewawancara tidak menentukan jumlah informan. Apabila responden pertama di rasa sudah cukup memberikan semua data yang di butuhkan, maka wawancara selesai. Namun, jika responden pertama memberikan arahan kepada responden ke dua maka pewawancara harus melakukan wawancara kembali kepada responden kedua. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan Bupati Tulang Bawang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi dengan dokumen kita

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 137

²¹ Suharsimin Arikundo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Reneka Cipta, 1998), h. 145-146

dapat mengumpulkan data dengan melihat beberapa dokumentasi sebagai informasi tambahan atau otentik sebagai penunjuk dalam pengumpulan data sebuah penelitian. Adapun data dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang hasil wawancara serta penelitian yang di lakukan di Kabupaten Tulang Bawang.

Peneliti hanya menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi, dikarenakan kejadian tersebut sudah berlalu. Dalam metode wawanca hanya ada satu informan yaitu Winarti sebagai objek penelitian, dan dirasa cukup akurat dalam mendukung penelitian ini, ditambah lagi dengan metode dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian, karena dalam metode dokumentasi terdapat dokumen-dokumen penting pada saat kemenangan Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang.

4. Metode Analisa Data

Analisa data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, data yang di kumpulkan berupa konsep dan bukan berupa angka²² yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami data-data yang di tetapkan dalam penelitian. Setelah melakukan analisis data, maka langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan kualitatif dengan mempergunakan cara berfikir induktif menarik kesimpulan dari khusus ke umum²³

269 ²²Koentjarningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1996), h.

²³Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah MPada, 1985), Jilid I, h. 143

H. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan komunikasi politik sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “ Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Purworejo” yang di tulis oleh Basith Bakhtiar Yulfi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi politik yang di lakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada masyarakat muslim di Kabupaten Purworejo?” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik yang di lakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada masyarakat muslim di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini fokus membahas komunikasi politik yang di lakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik yang di gunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non Statistik* yaitu analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah komunikasi politik yang di lakukan oleh DPC PPP Kabupaten Purworejo kepada masyarakat muslim di Kabupaten Purworejo melalui media massa dan secara langsung. Menggunakan media massa di lakukan melalui radio, baliho, spanduk, bendera, umbul-umbul, dan pamphlet. Di radio DPC PPP Kabupaten Purworejo memasang iklan berupa *Spot* yang di tayangkan lima kali dalam sehari selama setahun. Keberadaan radio membantu DPC PPP Kabupaten

Purworejo dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan partai tersebut. DPC PPP Kabupaten Purworejo juga melakukan komunikasi secara langsung melalui program pemberian bantuan maupun pengajian yang dilaksanakan secara rutin tiga bulan sekali di setiap cabang PPP. Cara masyarakat untuk mendapatkan program bantuan adalah proposal terlebih dahulu kepada DPC PPP Kabupaten Purworejodan program yang di ajukan harus sesuai dengan visi, misi dan prinsip dasar yang ada di DPC PPP Kabupaten Purworejo.²⁴

2. Skripsi yang berjudul “ Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dengan Masyarakat Berbasis NU Di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap” yang di tulis Arif Indiarto, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2013.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) bagaimana komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap? Dan 2) faktor-faktor penghambat terjadinya komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui komunikasi politik yang meliputi bentuk bentuk komunikasi, sarana komunikasi, dan pesan-pesan politik antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan masyarakat berbasis NU. Dan 2) mengetahui faktor penghambat terjadinya komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan

²⁴ Basith Bakhtiar Yulfi, “*Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Purworejo*” (Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013), h. ii

Kesugihan Kabupaten Cilacap, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kesugihan. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisa data menggunakan model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah DPAC PKB Kecamatan Kesugihan melakukan komunikasi politik di lakukan dengan cara sederhana, lewat pengajian, yasinan, minggu keliwon, rapat dengan pengurus dan kader. Komunikasi politik sangat di pengaruhi oleh figur kiyai yang ada di pondok pesantren. Media hanya sebatas stiker, spanduk, dan bendera. Sedangkan media radio jangkauannya masih sangat minim yaitu hanya lingkup pondok pesantren saja. Faktor penghambat komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa dengan masyarakat berbasis NU di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap adalah terlalu luasnya Kecamatan Kesugihan, Konflik Internal Partai pada tahun 2009, kegiatan-kegiatan rutin yang melibatkan partai belum sepenuhnya di dukung oleh semua elemen pengurus di tingkat desa, kurangnya pemahaman politik pada kader partai dan kurang terpeliharanya hubungan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Banser NU.²⁵

3. Tesis yang berjudul “Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Saat Reses Tahun 2010” yang di tulis oleh Afib Rizal, Jurusan Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro Semarang 2011.

²⁵ Arif Indarto, “*Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa Dengan Masyarakat Berbasis NU di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*” (Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. ii.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya komunikasi politik Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan reses dan apa faktor penghambat gaya komunikasi politik tersebut.

Peneliti ini menggunakan teori tentang gaya komunikasi konteks tinggi dan konteks rendah serta gaya komunikasi mengendalikan dua arah, berstruktur , dinamis, melepas dan penarikan diri. Apabila di gabungkan, gaya komunikasi dua arah, berstruktur dan melepas masuk dalam kategori komunikasi konteks tinggi dimana aspek komunikasi non verbal lebih dominan dari aspek verbal. Sedangkan dalam gaya komunikasi mengendalikan, dinamis, dan melepaskan masuk dalam kategori konteks rendah dimana aspek komunikasi verbal lebih dominan dari pada aspek non verbal. Hasil penelitian ini terungkap, gaya komunikasi politik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kecendrungan bergaya konteks rendah hanya satu yang memiliki kecendrungan tingkat tinggi yaitu Rizal Kurniawan dimana gaya tersebut dari latar belakang dan lingkungan yang di sesuaikan dengan tipologi konstituennya.²⁶

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana bentuk komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada pemilukada Dan faktor pendukung dan peghambat apa yang mempengaruhi Winarti dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilukada”

²⁶ Afib Rizal, “*Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010*” (Tesis Jurusan Ilmu Komunikasi, Megister Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro Semarang 2011), h. ii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari komunikasi politik Winarti dengan masyarakat pada saat pemilu pada dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Winarti dalam melakukan komunikasi politik pada saat pemilu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini fokus membahas komunikasi politik yang dilakukan oleh Winarti pada saat pemilu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non Statistik* yaitu analisis Kualitatif.

BAB II

KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILUKADA

A. Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik, maka upaya untuk mendekati pengertian apa yang di maksud komunikasi politik, menurut dahlan ialah suatu bidang atau di siplin yang menelaah prilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap prilaku politik.²⁷

Maedow dalam nimmo juga membuat definisi bahwa “*political communication refres to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system*”. Di sini Maedow member tekankan bahwa simbol-simbol atau pesan yang di sampaikan itu secara signifikan di bentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.²⁸

Menurut Fitri yanti, komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja di lakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berprilaku tertentu.²⁹

Menurut Miriam Budiarjo, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan

²⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, Dan Strategi, Edisi Revisi 2011* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 29.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Fitri Yanti, “*Komunikasi Politik Dan Politik Komunikasi Suatu Relasi Dan Peran Media Massa*”. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 5/No. 3 (Januari-Juni 2007) h. 52.

kepentingan” (*interest aggregation*) dan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) untuk di perjuangkan menjadi kebijakan publik.³⁰

Dari beberapa pengertian yang telah di kemukakan, maka menurut penulis komunikasi politik adalah suatu proses dimana terdapat 2 komponen yaitu antara komunikator dengan komunikan yang berinteraksi untuk menyampaikan gagasan, ide, pokok pikiran yang bertujuan untuk tercapainya suatu kehendak yang di inginkan komunikator terhadap komunikan. Penulis juga berasumsi bahwa komunikasi politik dengan strategi politik sangat berbeda, dimana strategi politik itu iyalah siasat atau tehnik untuk merencanakan sesuatu mengenai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan komunikasi politik setiap pasangan calon harus memiliki strategi politik guna menarik perhatian masyarakat agar pesan yang disampaikan nantinya dapat diterima oleh masyarakat tersebut.

2. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan di siplin komunikasi lainnya, maka komunikasi politik sebagai *bady of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.³¹

a. Komunikator Politik

Menurut Roni Tabroni, komunikator politik adalah orang yang melakukan komunikasi dalam konteks politik kapanpun dan dimanapun pesan itu di sampaikan. Ia menyampaikan pesan-pesan politik, baik

³⁰ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405-406.

³¹ Hafied Cangara, *Op. Cit.* h. 45.

kepada individu, kelompok maupun massa. Komunikator merupakan orang yang terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.³²

Menurut Asep Saiful Muhtadi, komunikator dalam komunikasi politik adalah pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi politik dapat di bedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang.³³

Menurut Gun Gun Herianto dan Shohulhan Rumar, komunikator politik merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik kepada pihak lain, baik bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. Komunikator dalam komunikasi politik terdiri atas sebagai berikut ini :

- 1) Politisi yang terbagi menjadi dua tipe, yakni politisi wakil dan politisi ideologi.
- 2) Aktivis, yang terbagi menjadi aktivis juru bicara dan aktivis pemuka pendapat.
- 3) Profesional, yang terbagi menjadi profesional jurnalis dan profesional promotor.³⁴

³² Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2012), h.45

³³ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 31.

³⁴ Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), h. 15.

Dari beberapa pengertian yang telah di kemukakan, maka menurut penulis komunikator politik adalah orang atau lembaga yang bertindak atau melakukan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur politik yang di tujukan kepada komunikan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang di sampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik di sadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

c. Saluran atau Media Politik

Pada dasarnya, komunikasi politik memerlukan saluran. Saluran komunikasi politik berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada masyarakat banyak. Menurut Hafied Cangara, saluran atau sasaran media politik adalah alat atau sarana yang di guankan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya *Media Cetak*, surat kabar, tabloid, majalah, buku. *Media Elektronik* : film, radio, televisi, video, komputer, internet.³⁵

Menurut Asep Saeful Muhtadi, saluran atau media politik adalah setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.³⁶

Beragamnya pesan yang di sampaikan oleh politikus dalam konteks komunikasi politik, menyebabkan perlunya saluran komunikasi

³⁵ Hafied Cangara, *Op. Cit.* h. 31.

³⁶ *Ibid.* h. 32

politik dengan berbagai bentuk. Pesan komunikasi politik kadang di sampaikan lewat lembaga-lembaga tertentu, seperti kata, gambar, atau perilaku tertentu yang ada kaitannya dengan aktivitas politik. Ada pesan yang cukup dengan isyarat, tetapi banyak yang harus di sampaikan lewat sebuah pementasan tertentu atau karya seni yang lebih rumit. Yang lebih penting dari saluran komunikasi politik ini adalah bagaimana agar pesan-pesan politik dapat di sampaikan kepada yang di tuju dan dapat di mengerti sehingga terbangun kesadaran atau kesamaan persepsi tentang pesan politik yang dimaksud.³⁷

Siapa pun yang menjadi komunikator politik perlu memiliki keahlian atau kemampuan menyampaikan pesan secara tepat. Setiap lapisan masyarakat tentu saja memiliki karakter masing-masing. Terlebih kalau bicara budaya yang sangat beragam, penyampaian pesan politik tidak lagi hanya persoalan teknis, tetapi juga bagaimana masyarakat yang sangat beragam itu dapat memahami substansi dari pesan politik yang di sampaikan komunikator.³⁸ Sekurang-kurangnya ada tiga saluran komunikasi politik di antaranya adalah :

1) Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Komunikasi massa menurut Ellizabteh-Noelle- Neuman, sebagaimana di kutip oleh Jalalludin Rakhmat adalah :

(a) Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis.

³⁷ Roni Tabroni, *Op. Cit.* h. 40.

³⁸ *Ibid.* h. 41

- (b) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan.
- (c) Bersifat terbuka, artinya di tunjukkan kepada publik yang tidak terbatas.
- (d) Mempunyai publik yang secara geografis tersebar.³⁹

Sedangkan definisi komunikasi sendiri sampai saat ini masih terdapat banyak perdebatan di kalangan para ahli komunikasi, karena terdapat banyak sekali perbedaan mereka dalam memberikan definisi komunikasi itu sendiri. Mulai dari yang sempit, misalnya "komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik" atau bahkan yang terlalu luas, misalnya "komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih" sehingga para peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan atau tanaman.

Definisi tentang komunikasi massa yang di kemukakan oleh para ahli komunikasi. Namun, pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik).⁴⁰ Media massa yang di maksud di sini adalah media yang bersifat modern atau yang di hasilkan oleh teknologi, bukan media tradisional yang sering di kenal seperti kentongan, bedug dan lain-lain.

Beberapa definisi komunikasi massa menurut para ahli:

- a) Jhoseph R. Dominick : komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau

³⁹ Jalalludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

⁴⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 1984) h. 20

lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar.

- b) Jalalludin Rakhmat : komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang di tunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.
- c) Defleur dan Denis : komunikasi massa adalah suatu proses dimana komunikator - komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang di harapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara.
- d) Elizabteh-Noelle-Neuman sebagaimana di kutip oleh Jalalludin Rakhmat, komunikasi adalah :
 - 1) Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis.
 - 2) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan dan komunikator.
 - 3) Bersifat terbuka, artinya di tunjukkan kepada publik yang tidak terbatas.
 - 4) Mempunyai publik yang secara geografis terbesar.

Media massa hubungannya dengan komunikasi massa ialah Kedua istilah di atas sangat berkaitan erat, media massa menjadi bagian yang ada dalam komunikasi massa. Yang di katakan media massa di sini antara lain, media elektronik (televisi, radio, dan

internet), media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid). Dari ragam bentuk media massa ini, internet merupakan media yang dapat dikatakan sebagai media yang masih baru dan juga masih menjadi perdebatan pada media massa.

2) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal menurut Joseph A. Devito, dalam buku *The Interpersonal Communication Book*, komunikasi antara pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.⁴¹

Dalam kajian komunikasi, komunikasi interpersonal (tatap muka) tergolong komunikasi yang tradisional. Namun sampai saat ini, sesungguhnya tidak ada yang dapat menggantikan fungsi komunikasi manusia yang selalu dinamis dan memiliki kelebihan pada aspek pendekatan humanitasnya. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat canggih sekalipun, sentuhan komunikasi secara langsung memiliki tingkat efektivitas tersendiri.

Jika dilakukan dalam konteks politik, komunikasi interpersonal dapat digunakan sebagai ajang untuk melakukan lobi politik. Kendati setiap politikus dapat melakukannya dengan teknologi canggih seperti, *handphone*, *email*, atau *facebook* :manusia belum menemukan kepuasan jika melakukan secara langsung. Berbagai komitmen politik dilakukan biasanya lewat pola komunikasi

⁴¹ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), h.

interpersonal. Walau komunikasi interpersonal memiliki kekurangan dari aspek keterjangkauan, paling tidak pola ini dapat di gunakan untuk hal-hal yang spesifik, langsung dan khusus baik orangnya maupun pesannya.⁴²

3) Komunikasi Organisasi

Secara etimologi (bahasa) kata “komunikasi” berasal dari bahasa inggris “*communication*” yang mempunyai akar kata dari bahasa latin “*Comunicare*” kata “*Comunicare*” sendiri memiliki tiga arti yaitu : “*to make common*” atau membuat sesuatu jadi umum, kemudian “*cum dan munus*” berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah, dan yang terakhir yaitu membangun pertahanan bersama.⁴³

Sedangkan secara epistemologi (istilah) menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “*Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*” mendefinisikan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat di fahami.⁴⁴

Onong Uchyana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau prasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan informasi, opini dan lain-lain yang

⁴² Roni Tabroni, *Op. Cit.* h. 42.

⁴³ Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), cet.3, h. 1

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Cet.9, h. 169

muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.⁴⁵

Dari definisi tersebut terkandung dua pengertian, yaitu *Proses* dan *Informasi*. *Proses* merupakan suatu rangkaian dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus di lalui dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang di maksud *Informasi* atau keterangan ialah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode, atau tanda tertulis lainnya yang mengandung pengertian buah pikir atau pengetahuan apapun yang dapat di pergunakan oleh setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, baik, dan tepat.⁴⁶

Istilah organisasi berasal dari bahasa latin *Organizare*, yang secara bahasa berarti panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut panduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana.⁴⁷

Sehein mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Suhein juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain

⁴⁵ Onong Uchyana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 156

⁴⁶ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 1

⁴⁷ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, (Jakarta : Grasido, 2011), h. 1

dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.⁴⁸

Robbins mengatakan organisasi adalah bentuk kerja sama yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kerja sama karena di dalamnya terbentuk jalinan, hubungan, relasi dan komunikasi antara sejumlah orang yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama atau yang berbeda-beda (subsistem) lalu membentuk sebuah sistem (berinterelasi satu sama lain) untuk memenuhi tujuan yang ideal konkret yang telah disepakati bersama.⁴⁹

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (*vote*) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.⁵⁰

3. Fungsi Komunikasi Politik

Sebagai disiplin ilmu, maka komunikasi politik menurut McNair memiliki lima fungsi dasar, yakni :

- a. Memberi informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya.
Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi pengamatan, dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat

⁴⁸ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), h. 23

⁴⁹ Alo Liliweri, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), h. 51

⁵⁰ Hafied Cangara, *Op. Cit.* h. 3

liputan yang objektif (*Objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realita fakta tersebut.

- c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengambil hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakkan demokrasi.
- d. Membuat publikasi yang di tunjukkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.
- e. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat di salurkan kepada media massa.⁵¹

4. Tujuan Komunikasi Politik

Roni Tabroni memandang bahwa tujuan komunikasi politik sangat berkaitan dengan pesan politik yang di sampaikan komunikator. Sesuai dengan tujuan komunikasi, tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekedar menyampaikan informasi politik , membentuk citra politik, membentuk opini publik, dan juga bisa menghendel pendapat atau tuduhan lewat politik. Lebih jauh dari itu, komunikasi politik juga bertujuan menarik simpati publik untuk meningkatkan partisipasi politik sesuai dengan kepentingannya.⁵²

⁵¹ *Ibid.* h. 32-33

⁵² Roni Tabroni, *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 26

a. Citra Politik

Citra berasal dari bahasa Jawa yang berarti gambar, kemudian citra di kembangkan menjadi gambaran sebagai padanan kata *image* dalam bahasa Inggris. Kenneth E. Boulding dalam Ardial menjelaskan bahwa citra di bentuk sebagai hasil dari pengetahuan masalah pemilik citra, dan sejarah merupakan bagian dari citra itu sendiri.⁵³ Berdasarkan penjelasan Boulding tersebut, dapat di simpulkan bahwa citra merupakan serangkaian pengetahuan, pengalaman, dan perasaan maupun penilaian yang di organisasikan kedalam sistem kognisi manusia atau pengetahuan pribadi yang sangat di yakini kebenarannya.

Jadi citra politik bisa di pahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsensus). Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dari kognisi komunikasi politik. Roberts, menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra itu lah yang memengaruhi pendapat atau perilaku khalayak.⁵⁴

Oleh karena itu, citra politik dapat di rumuskan sebagai gambaran tentang politik yang memiliki makna kendati tidak selamanya sesuai dengan realita yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui

⁵³ Kenneth E. Boulding dalam Ardial dalam Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 26-27

⁵⁴ Roni Tabroni, *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 27.

kepercayaan, nilai, pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media massa, yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.⁵⁵

b. Opini Publik

Komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan opini publik. Hal itu di anggap sebagai konsekuensi sebuah proses pencitraan yang di lakukan terlebih dalam konteks dimana pencitraan itu menggunakan media massa sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Opini publik akan terbentuk ketika komunikator politik menyampaikan gagasan atau pesan kepada publik. Wacana yang di bangun sedikit banyak akan menjadi bagian dari perbincangan publik sehingga terbentuk opini publik yang sangat beragam.⁵⁶

Menurut Ardial, konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatukan kehendak idea atau gagasan.⁵⁷

c. Partisipasi Publik

Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini. Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap pejabat atau wakil rakyat seringkali menyebut rakyat atau mengeklaim rakyat ketika berbicara atau

⁵⁵ Roni Tabroni, *Op. Cit.* h. 27.

⁵⁶ *Ibid.* h. 28.

⁵⁷ Ardial dalam Roni Tabroni. *Op. Cit.* h. 28

membuat kebijakan.⁵⁸ Dengan demikian partisipasi politik menurut miriam budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁵⁹ Menurut seorang tokoh masalah partisipasi Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses menentukan kebijakan umum (*the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).⁶⁰

B. PEMILUKADA

1. Pengertian

Pemilukada adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya di sebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.⁶¹ Pemilukada di landaskan pada semangat otonomi daerah yang di gulirkan setelah masa reformasi bergulir pada tahun 1998 dan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Namun pemilukada baru terlaksana pada tahun 2005 mengingat mempersiapkan

⁵⁸ *Op. Cit*, h. 28

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

⁶⁰ Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

⁶¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

segala perangkat yang di butuhkan, terutama perundangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan di daerah seluruh Indonesia.

Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2010. Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberi kewenangan yang utuh dalam rangka memilih kepala daerah yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi daerah yang di pimpinnya, karena di harapkan kepala daerah terpilih adalah orang-orang daerah yang bersangkutan (putra daerah). Namun saat sekarang ini sangat sulit menemukan putra daerah yang benar-benar ingin memajukan daerahnya sendiri, menjadi polemik tersendiri bagi sebagian anak bangsa akan merosotnya rasa perjuangan untuk daerah dan bangsa kita sendiri.

Pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah , haruslah di pandang dengan berbagai sudut pandang. Namun, yang terpenting melihat kedalam aturan tentang status dan peran secara normatif dari seorang kepala daerah tersebut. Ada dua peran yang harus di mainkan oleh seorang kepala daerah, yakni pertama, ia harus berperan sebagai kepala daerah otonom, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian peran kedua, kepala daerah khususnya untuk daerah provinsi, ia harus berperan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Pelaksanaan

pemilukada serentak juga bertujuan untuk meningkatkan keefisienan dalam sebuah pemerintahan.

Pelimpahan tugas dan wewenang gubernur dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di daerah didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Peran gubernur, dimana pada hakikatnya secara formal pemerintah provinsi tidak memiliki rakyat, karena sudah terdesentralisasi dan menjadi milik pemerintah kabupaten dan kota, namun demikian karena ikatan sosial dan etnis hubungan kekerabatan tersebut semakin akrab dan ikatan itu semakin meluas dan merasakan hubungan tersebut menjadi suatu pola hubungan antara kedaerahan. Peran pemerintah provinsi hanya bersifat sebagai fasilitas dan pengawasan jalannya pemerintahan sebagaimana kedudukan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, untuk menjamin rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶²

Pemilukada langsung (dan serentak) merupakan salah satu trobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pemilukada adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengheing democracy*) serta mewujudkan tatanan pemerintah yang efektif.⁶³

Pelaksanaan pemilukada langsung pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak

⁶² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 128-129

⁶³ Zubakhrum Tjenreg, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016), h. 41

politik.⁶⁴ Kini pilukada tidak hanya dilakukan secara langsung setiap lima tahun sekali, namun juga serentak sebagaimana yang dijelaskan UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.⁶⁵ Kebebasan individu dan persamaan hak politik hanya sebagai formalitas yang membodohi masyarakat, karena dalam menentukan seorang kepala daerah masyarakat hanya memiliki hak memilih namun yang menentukan tetaplah dari golongan partai politik, sehingga partai politik terlihat seperti yang mempunyai hak penuh dalam menentukan seorang pemimpin, dengan mencalonkan kader-kader yang dianggap unggul dalam partainya.

Sejak disahkannya UU No. 8 Tahun 2015, konstalasi politik di aras lokal pun menjadi berubah. Perdebatan politik hukum pilukada itu menemukan ujungnya. UU No. 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa pilukada dilaksanakan secara langsung dan serentak.⁶⁶ Dengan hadirnya pilukada serentak, menjadi gambaran bahwa pilukada langsung yang dilaksanakan sejak 2005 itu mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan dengan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.⁶⁷

2. Landasan Hukum Pilukada

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Negeri RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶⁴ *Ibid*, h. 42

⁶⁵ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), h. 25

⁶⁶ *Ibid*, h. 65

⁶⁷ *Ibid*, h. 68

1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁶⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan peraturan komisi pemilihan umum No. 14 Tahun 2010.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah di atur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis bedasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang di ajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD, dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD, dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di bentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.⁶⁹ Adapun yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2010.

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pemilukada serentak antara lain: UU No. 22/2014; UU No. 1/2015, dan UU

⁶⁸ Op. cit, h. 54

⁶⁹ *Ibid*, h. 130

No. 8/2015. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah perlu di sebutkan juga karena pelaksanaan pilkada serentak terkait erat dengan pelaksanaan otonomi dan system pemerintahan di tingkat lokal. Adapun peraturan per undang-undangan tentang pemerintah daerah yang paling relevan saat ini adalah UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpu No. 2/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2014, dan terakhir UU No. 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah.⁷⁰

Demikian pun berbagai peraturan pelaksanaan terkait pilkada serentak yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan yuridis, antara lain (1) PKPU No. 2/2015 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada serentak, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara; (3) PKPU No. 4/2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilu; (4) PKPU No. 5/2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat; (5) PKPU No. 6/2015 tentang norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pilkada serentak; (6) PKPU No. 7/2015 tentang kampanye pilkada serentak; (7) PKPU No. 8/2015 tentang dana kampanye; (8) PKPU No. 9/2015 tentang pencalonan kepala daerah; (8) PKPU No. 10/2015 tentang pemungutan dan perhitungan suara; (9) PKPU

⁷⁰ Zubakhrum Tjenreg, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016), h. 15

No. 11/2015 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.⁷¹

3. Sejarah Pemilukada Serentak

Di Indonesia telah berkali-kali melangsungkan pemilihan umum yang di sebut-sebut pesta demokrasi pancasila. Satukali sewaktu pemerintah orde lama dan enam kali sewaktu pemerintahan orde baru, serta dua kali selama era reformasi. Umumnya ada dua system pelaksanaan pemilihan yang di pakai di Indonesia, yaitu sebagai berikut: system Distrik, system ini per lokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah di tentukan. Jadi banyak jumlah suara yang akan terbuang. Tetap karena waki yang di pilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akrab dengan wakilnya (*prsonen stelsel*). Satu distrik biasanya satu wakil (*single member constituency*).

System proposional, system ini berjumlah penduduk pemilih. Misalnya 50.000 penduduk pemilih 1 wakil (suara berimbang), sedangkan yang di pilih adalah sekelompok orang yang di ajukan kontestan pemilu (*multi member constituency*), yang di kenal lewat tanda gambar (*lisjsten stelsel*), sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Tetapi sisa dapat di gabung secara nasional untuk kursi tambahan. Dengan begitu partai kecil dapat di hargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemili di hargai.

Indonesia berada di tengah-tengah kedua system ini (system campuran) dalam pemilihan selama orde baru, tetapi sedikit cendrung agak mirip terhadap system proporsional.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

Setelah presiden soeharto di jatuhkan dari kekuasaanya pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat empat perubahan mendasar di dalam mekanisme pemilu. Pertama, kembalinya system “multi-partai” dari system “tri-partai” dalam pemilu yang di realisasikan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan di ikuti oleh 48 partai. Kedua, pada pemilu 2004, pemilu di adakan dua kali, pemilu pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemilu kedua untuk memilih presiden secara langsung. Perubahan ketiga, dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PEMILUKADA (Pemilihan Umum Kepala Daerah) secara langsung seperti yang di amanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2004. Perubahan ke empat, pada pemilu 2009, mahkamah konstitusi memutuskan perhitungan suara menggunakan suara terbanyak dan bukan nomor urut caleg. Ke empat perubahan mendasar ini telah mempengaruhi system, struktur, intensitas persaingan, dan prilaku institusi-institusi yang terlibat dalam setiap pemilu baik nasional maupun di daerah.

Pemilu yang di adakan tahun 2009 adalah yang ke sepuluh kalinya semenjak Indonesia merdeka. Seperti yang sudah di sebutkan, pemilu pertama kali di adakan pada tahun 1995 dari yang yang terakhir di lakukan pada tahun 2009. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya., pemilu tahun 2004 memulai babak baru kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia akan memilih presiden secara langsung, bebas dan terbuka. Sebelumnya pemilihan presiden di lakukan melalui

⁷² Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) Ed. Rev, h. 109-110

mekanisme yang ada di MPR. Tidak jarang proses ini melalui lobi-lobi politik, padahal pengambilan keputusan melalui lobi politik di anggap politik praktik. Pihak-pihak yang memberi tekanan melalui proses tawar-menawar politik akan berpeluang besar dalam memenangkan pemilihan di parlemen.

Sehingga tidak jarang keputusan yang di hasilkan di MPR berbeda dengan keinginan rakyat. Hal ini terjadi di Indonesia di tahun 1999, di mana PDI memenangkan jumlah perolehan suara dalam pemilu, namun gagal mengantarkan Megawati menjadi presiden. Hal ini juga menyadarkan politik akan pentingnya di lakukan pemilihan presiden secara langsung, bebas, dan terbuka.⁷³

Perubahan politik yang sangat radikal terjadi di Indonesia antara lain di tandai dengan runtuhnya orde baru yang menerapkan system politik yang otoritarian, yang kemudian berubah system politik demokrasi. Demikian pula system pemerintahan yang sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang lebih di kenal dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan proses politik untuk memilih para kepala daerah secara langsung yang di amanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ketentuan pilkada langsung merupakan kemajuan demokrasi di Indonesia yang menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut.⁷⁴

⁷³ Firmazah, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 8-10

⁷⁴ Irtanto, *Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 159

Pemilukada langsung di anggap lebih demokratis dengan dua pertimbangan. Pertama, pemilukada langsung memberi kesempatan lebih luas untuk tampilnya atau terpilihnya kepala daerah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, dengan pemilukada langsung maka stabilitas pemerintahan lebih terjaga berhubung kepala daerah tidak mudah di jatuhkan oleh DPRD.⁷⁵

Sejak di tetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, mulai terjadi harmonisasi hubungan antara kewenangan rakyat dan pemerintah. Pasal 1 dan UU No. 8 Tahun 2015 menetapkan bahwa rakyat di berikan amanah penuh menentukan pemimpin daerahnya, meskipun pelaksanaannya di atur secara serentak oleh pemerintah.⁷⁶ Pelaksanaan pemulikada langsung di nilai sudah cukup baik, namun masih adanya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut. Pemilukada langsung memberi peluang korupsi dari berbagai pihak dan tidak sedikit menimbulkan konflik serta kesenjangan antara masyarakat daerah tersebut. Maka di sempurnakan lagi dengan pemilukada langsung secara serentak sebagai evaluasi dari pelaksanaan pemilukada langsung yang telah di laksanakan sebelumnya.

Maka pada masa sekarang ini pelaksanaan pemilukada tidak hanya di laksanakan secara langsung setiap limatahun sekali, namun juga di laksanakan secara serentak sebagaimana yang di jelaskan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Melalui UU

⁷⁵ *Ibid*, h. 162

⁷⁶ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Perjuangan Pilkada Serentak*, (Jakarta : PT. Mizan Publika, 2016), cet.1, h. 24

No. 8 Tahun 2015, memberi skema ulang tahapan pemilukada serentak menjadi tujuh gelombang.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, h. 25

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DAN PEMILUKADA

A. Sejarah Singkat Kabupaten Tulang Bawang

Daerah dengan namanya yang unik ini, secara khusus memiliki latar belakang sejarah yang demikian panjangnya, karena menurut Al-Haidar, penulis buku *Lampung Bersimbah Darah*, nama ini berasal dari bahasa cina yaitu *To Lang Po'Hwang*, yang pada akhirnya di kenal umum dengan sebutan Tulang Bawang. Dalam buku tersebut juga termaktub bahwa nama ini adalah nama satu di antara sekian kerajaan kuno yang ada di nusantara. Kemudian Al-Haidar mengutip J.W.Narding yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Tulang Bawang ini terletak di tepi sungai Tulang Bawang antara Kota Menggala dan Kampung Pagar Dewa dalam radius $\pm 20\text{Km}$, namun sejak tahun 700M nama kerajaan ini tidak lagi terdengar.

Nampaknya setelah berakhirnya era kerajaan di Tulang Bawang ini system pemerintahan yang ada hanyalah pemerintahan adat, yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berada pada tua-tua adat yang secara khusus di daerah Lampung di sebut “penyimbang”, system ini nampaknya telah berlaku hingga datangnya kolonialisme Belanda ke daerah ini pada akhir abad ke-17 menurut De Jagger 1687M.

Sejak itulah kekuasaan penyimbang di daerah ini mulai menurun, sungguhpun di fungsikan namun nilai hakikinya sudah tidak lagi sebagaimana sebelumnya, sebab menurut pengamatan nampaknya para

penyimbang hanya di beri kekuasaan yang mirip dengan kekuasaan *Legislative* saat ini, namun kadar kekuasaan minim sekali di bandingkan kekuasaan *Eksekutif* yang jauh lebih besar.

Selanjutnya pada era kemerdekaan Tulang Bawang menjadi salah satu kewedanaan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Sebagai kewedanaan Tulang Bawang di bagi menjadi tiga wilayah keasisten wedanaan (Kecamatan) yang di pimpin oleh seorang asisten wedana (sekarang Camat), yaitu asisten Wedana Panaragan, Asisten Wedana Menggala dan Asisten Wedana Mesuji.

Lantas sejak terhitung tahun 1997, sesuai undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang pengesahan berdirinya Kabupaten Tulang Bawang dan Tanggamus, secara resmi daerah ini berdiri sendiri dengan nama Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Kabupaten di dalam daerah Provinsi Lampung dengan wilayahnya yang meliputi wilayah sebagaimana di tetapkan oleh pemerintah Belanda tahun 1930 dalam Peta Marga Afdelling, yakni wilayah Marga Tegamo'an, Marga Buai Bulan, Marga Suai Umpu dan Marga Aji.⁷⁸

Dalam kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997, telah terjadi pergantian pejabat pembantu Bupati selama beberapa masa bhakti, yang di jabat oleh:

1. Drs. Hi. M. yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d 1985)
2. Cardinal, BA (masa bhakti 1985 s.d 1989)
3. Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d 1993)

4. Drs. Rukhyat Kusumayudha (masa bhakti 1993 s.d 1994)
5. Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d 1996)
6. Hi. Santori Hasan, SH (masa bhakti 1996 s.d 1997)

Pada tahun 1997, di bentuklah sekertariat persiapan Kabupaten Tulang Bawang, dengan sekretaris merangkap pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, SH. Selanjutnya untuk memuluskan pembentukan Kabupaten, di tunjuklah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 9 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang Penunjukkan Plt Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang.

Melalui serangkaian proses yang cukup melelahkan, akhirnya Kabupaten Tulang Bawang lahir, dan di resmikan keberadaanya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997, sebagai tindak lanjut di tetapkan UU No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Dimana untuk selanjutnya pada tanggal 24 November 1997 terpilihlah Hi. Santori Hasan, SH sebagai Bupati Tulang Bawang pertama, untuk periode tahun 1997-2002, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 1997.

Pada proses selanjutnya, melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang pada tanggal 12 November 2002 terpilihlah Dr. abdurachman Sarbini, dan AA. Syofandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang untuk periode 2002-2007, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 2002. Kemudian melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

langsung oleh masyarakat yang pertama kali di laksanakan pada tahun 2007, Dr. Abdurachman Sarbini kembali terpilih sebagai Bupati Tulang Bawang periode 2007-2012, berpasangan dengan Drs. Agus Mardihantono, MM, sebagi Wakil Bupati, yang di lantik pada tanggal 9 Desember 2007.

Sementara itu sejak berdirinya Kabupaten Tulang Bawang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami proses pergantian pucuk pimpinan. Pada periode 1997-1999, Ketua DPRD di jabat Abdi SP, pada periode 1999-2004 Ketua DPRD di jabat Samsul Hadi, dan periode 2004-2009 Ketua DPRD di jabat Lamijiono, S.Pd, MM, yang kemudian sebelum masa bhakti berakhir di gantikan oleh Herman Artha.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 secara resmi mengakhiri masa jabatannya, yang kemudian melalui mekanisme yang berlaku di gantikan oleh Anggota DPRD periode berikutnya yaitu 2009-2014, yang merupakan hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009. Sedangkan Ketua DPRD masa bhakti 2009-2014 adalah Winarti, SE yang di lantik pada tanggal 19 Oktober 2009.

Kabupaten Tulang Bawang yang pada awal berdirinya memiliki luas Wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari Wilayah Lampung, merupakan Kabupaten terbesar di Provinsi Lampung. Menyadari luas Wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, maka dengan di dukung aspirasi masyarakat, pada tahun 2007, Bupati Tulang Bawang Dr. Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 Kabupaten,

yaitu Kabupaten Induk Kabupaten Tulang Bawang, dan dua Kabupaten baru, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Sedangkan dalam prosesnya, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji akhirnya dapat di wujudkan, yaitu dengan di sahkannya UU Nomor 49 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Mesuji dan UU Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 26 November 2008, yang kemudian di resmikan pendenitifannya tanggal 3 April 2009, yang di tandai dengan di lantiknya kedua Pejabat (Pj) Bupati di dua daerah otonomi baru tersebut oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Setelah wilayahnya di mekarkan, kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 4385.84 km² dengan 15 kecamatan, 151 kampung atau kelurahan.⁷⁹

1. Administrasi dan Kependudukan

Administrasi pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 151 kampung atau kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang adalah 417.782, dengan perincian sebagai berikut.

⁷⁹ <http://rapikabupatentulangbawang.blogspot.com/2013/04/sejarah-singkat-kabupaten-tulang-bawang.html?m=1>

Tabel 1. Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Banjar Agung	11	230.88	38.822
2	Banjar Margo	12	132.95	39.814
3	Gedung Aji	10	114.47	14.119
4	Penawar Aji	9	104.45	18.262
5	Meraksa Aji	8	94.71	14.532
6	Menggala	9	344.00	47.780
7	Penawar Tama	14	210.53	28.000
8	Rawajitu Selatan	9	123.94	31.835
9	Gedong Meneng	11	657.07	38.988
10	Rawajitu Timur	8	176.65	16.734
11	Rawa Pitu	9	169.18	19.734
12	Gedong Aji Baru	9	95.36	21.834
13	Dante Teladas	12	685.65	60.216
14	Banjar Baru	10	132.95	14.048
15	Menggala Timur	10	193.53	13.466
Jumlah		151	3.466,32	417.782

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang 2014

2. Mata Pencaharian

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah agraris, mata pencaharian pokok penduduk dominan pada sector pertanian. Hal ini di sebabkan bentuk topografi daerah yang cenderung dataran luas dan cocok untuk pertanian. Berikut ini adalah data mata pencaharian penduduk beserta jenis lahan.

Tabel 2.Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Tulang Bawang

No	Kecamatan	Kepala Keluarga Tani	Jenis Lahan		
			Sawah	Kering	Jumlah
1	Banjar Agung	4.299	10.000	10.999,00	11.009,00
2	Banjar Margo	5.610	265,00	12.535,00	12.800,00
3	Gedung Aji	2.464	6.476,00	8.524,00	15.000,00
4	Penawar Aji	2.470	5.727,00	7.404,00	13.131,00
5	Meraksa Aji	3.375	450,00	4.246,00	4.696,00
6	Menggala	3.096	870,00	26.956,00	27.826,00
7	Penawar Tama	3.789	611,00	15.823,00	16.434,00
8	Rawajitu Selatan	5.182	15.498,00	733,43	16.231,43
9	Gedong Meneng	5.260	8.595,00	14.361,00	22.956,00
10	Rawajitu Timur	4.006	2.433,00	3.820,00	6.253,00
11	Rawa Pitu	4.124	10.100,00	2.563,00	12.663,00
12	Gedong Aji Baru	3.898	4.936,00	8.018,00	12.954,00
13	Dente Teladas	3.748	8.895,00	30.040,00	38.935,00
14	Banjar Baru	9.544	252,00	8.860,25	9.112,25
15	Menggala Timur	2.298	4.385,00	10.173,00	14.558,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

B. Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten Tulang Bawang

KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan daftar pemilih tetap atau yang biasa juga di sebut (DPT) Pilkada Kabupaten Tulang Bawang 2017. Daftar pemilih tetap tersebut berjumlah 299.032 pemilih. Jumlah tersebut terdiri dari 155.351 laki-laki dan 143.681 perempuan yang tersebar di limabelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Data yang di terima oleh KPU jumlah DPT Kabupaten Tulang Bawang paling banyak pada Kecamatan Dente Teladas dengan 47.378 pemilih, Di ikuti dengan Kecamatan Menggala dengan 32.349 pemilih, Kecamatan Banjar Margo dengan 27.880 pemilih, Kecamatan Gedung Meneng dengan 26.133 pemilih, Kecamatan Penawar Tama dengan 23.165 pemilih, Kecamatan Banjar Agung 22.381 pemilih, Kecamatan Rawajitu Selatan dengan 29.584 pemilih, Kecamatan Gedung Aji Baru dengan 16.089 pemilih, Kecamatan Penawar Aji dengan 15.117 pemilih, Kecamatan Rawa Pitu dengan 12.663 pemilih, Kecamatan Meraksa Aji dengan 12.018 pemilih, Kecamatan Rawa Jitu Timur dengan 11.920 pemilih, Kecamatan Banjar Baru dengan 11.527 pemilih, Kecamatan Menggala Timur dengan 10.502 pemilih, Kecamatan Gedung Aji Lama dengan 10. 326 pemilih.⁸⁰

C. Profil Kandidat Winarti dan Hendriwansyah

Tabel 3.Biodata Winarti

Nama	Hj. Winarti, SE., MH
Tempat Tanggal Lahir	Kurnia Mataram, 04 April 1975
Suami	Ir. Kadek Suwartika, MH
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	Magister Hukum Tahun 2011
Alamat Rumah Dinas	Jl. Cendana Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala

Sumber : Tulangbawangkab.go.id

⁸⁰ <http://newslampungterkini.com/news/7853/dpt-tuba-akhirnya-ditetapkan-ini-daftar-lengkapnya.html>

Tabel 4. Riwayat Pendidikan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	Pendidikan Dasar	-	SDN 1 Lampung Utara	1985
2	SLTP	-	SMP Yayasan Pendidikan Islam 3 Seputih Mataram Lampung Tengah	1991
3	SLTA	-	SAME Negeri Pocowati Lampung Tengah	1994
4	Sarjana	-	Universitas Muhammadiyah Metro	2000
5	Pasca Sarjana	Magister Hukum	Universitas Bandar Lampung	2011

Sumber : *Tulangbawangkab.go.id*

Tabel 5. Pengalaman Birokrasi/Tugas

No	Jabatan	Periode
1	Direktur PT. Artika Jaya Sejahtera	2000 s/d 2017
2	Wakil Direktur PT. Wikajaya Bina Prima	2004 s/d 2016
3	Ketua DPRD Tulang Bawang	2004 s/d 2016
4	Bupati Tulang Bawang	2017 s/d 2022

Sumber : *Tulangbawangkab.go.id*

Tabel 6. Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Periode
1	Sekretaris Ranting PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang	1999
2	Anggota EFQ Lampung	2009
3	Ketua IKAD Tulang Bawang	2009
4	Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah	2000 s/d 2005
5	Bendahara PAC PDI Perjuangan Kecamatan Gedung Meneng	2005 s/d 2010
6	Anggota IKAD Provinsi Lampung	2004 s/d 2019
7	Pembina IKAD Tulang Bawang	2014
8	Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang	2010 s/d 2015
9	Bendahara ADKASI Provinsi Lampung	2014 s/d 2016
10	Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang	2015 s/d 2020

Sumber : Tulangbawangkab.go.id

Tabel 7. Biodata Hendriwansyah

Nama	Hendriwansyah
Tempat Tanggal Lahir	Menggala, 4 Maret 1974
Istri	Mursidah Musawir, Se
Anak	1. Alsana Yuta Rahmadita 2. Azhar Nadine Yuta Rahmadita
Agama	Islam
Jabatan Sekarang	Wakil Bupati Tulang Bawang
Alamat Rumah	Jl. Lintas Timur, Bujung Tenuk, Menggala
Alama Rumah Dinas	Jl. Cemara No. 356 Gunung Sakti Menggala

Sumber : Tulangbawangkab.go.id

Tabel 8. Riwayat Pendidikan Umum

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	Pendidikan Dasar	-	SDN 1 Ujung Gunung Ilir	1981 s/d 1987
2	SLTP	-	SMPN 1 Menggala	1987 s/d 1990
3	SLTA	-	SMU Negeri 5 Tanjung Karang	1990 s/d 1993

Sumber : Tulangbawangkab.go.id

Tabel 9. Riwayat Organisasi

No	Jabatan	Periode
1	Anggota dan Pengurus PAN Kecamatan Menggala	1998 s/d 2005
2	Ketua DPC PAN Kecamatan Gedung Meneng	2005 s/d 2010
3	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang	2009 s/d 2010
4	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulang Bawang	2010 s/d 2014
5	Anggota Banmus DPRD Kabupaten Tulang Bawang	2010 s/d 2014
6	Anggota Banleg DPRD Kabupaten Tulang Bawang	2010 s/d 2014
7	Sekretaris DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang	2010 s/d 2015
8	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang	2014 s/d 2019
9	Ketua DPD PAN Kabupaten Tulang Bawang	2015 s/d 2020

Sumber : Tulangbawangkab.go.id

D. Hasil Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang

Bedasarkan perhitungan suara yang telah di lakukan oleh KPUD Tulang Bawang, perolehan suara menunjukkan bahwa pasangan Winarti dan Hendriwansyah berhasil mengungguli pasangan *Incumbent* dengan selisih suara 3%. Berikut adalah tabel presentase perolehan suara pada pemilukada Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 10. Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang 2017

No	Nama Pasangan Calon	Presentase Suara
1	Syarnubi - Siti Solihah	7,20%
2	Hanan A. Rozak – Heri Wardoyo	45,16%
3	Winarti – Hendriwansyah	47,63%

Sumber : KPUD Kabupaten Tulang Bawang

BAB IV

BENTUK KOMUNIKASI POLITIK WINARTI DALAM PEMILUKADA 2017

Sistem demokrasi merupakan system dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara dalam mengambil keputusan, pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi merupakan system yang di rancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dapat di katakana keputusan terbesar sesungguhnya berada pada rakyat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Di Indonesia telah berkali-kali melangsungkan pemilihan umum yang di sebut-sebut pesta demokrasi pancasila. Satukali sewaktu pemerintah orde lama dan enam kali sewaktu pemerintahan orde baru, serta dua kali selama era reformasi. Pada masa reformasi lahirlah system otonomi daerah yang berarti pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan pilukada menjadi salah satu bentuk dari system ekonomi daerah yang di laksanakan di Indonesia.

Pelukada pada sejarahnya mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaanya mulai dari menggunakan system campuran yang merupakan sebuah adopsi dari system distrik dan system system proposional. Kembalinya system multi-partai yang pada awalnya tri-partai Setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaanya. Di lakukannya system pemilihan tidak langsung, dengan mekanisme pilihannya yang di wakili oleh DPRD. Pada tahun 2005 pemilihan di lakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Semua itu

bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar yang di miliki setiap warga Negara seperti yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, mulai terjadi harmonisasi hubungan antara kewenangan rakyat dan pemerintah. Pasal 1 dan UU No. 8 Tahun 2015 menetapkan bahwa rakyat di berikan amanah penuh menentukan pemimpin daerahnya, meskipun pelaksanaannya di atur secara serentak oleh pemerintah. Pelaksanaan pemulikada langsung di nilai sudah cukup baik, namun masih adanya kekurangan dalam pelaksanaanya tersebut.

Pada tahun 2017 Pemilikada di lakukan secara serentak untuk kedua kalinya, yang sebelumnya di lakukan pada tahun 2015. Ini merupakan sebuah harapan yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan lagi sebuah system demokrasi yang mana sebuah kekuasaan berada di tangan rakyat. Upaya pemerintah dalam hal ini membagi ke dalam tuju gelombang sebagaimana yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Melalui UU No. 8 Tahun 2015. Untuk pemilikada 2017 terdapat beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengikuti pesta demokrasi tersebut, salah satunya Kabupaten Tulang Bawang mengikuti pesta demokrasi yang di laksanakan pada tahun 2017. Terdapat tiga kandidat yang mengikuti pemilikada di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pesta demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Tulang Bawang di menangkan oleh kandidat nomor urut 3, yaitu pasangan Winarti dengan persentase 47,65%.

Menurut penulis dengan di laksanakan pemilukada serentak, merupakan sebuah bagian dari demokrasi yang di mana rakyat dapat memilih sosok pemimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki integritas, kopeten dan mampu untuk memajukan wilayah tersebut.

Paparan pada bab-bab sebelumnya dapat di lihat jelas adanya hubungan yang terjadi antara Winarti dengan masyarakat di daerah pilihnya, dalam proses komunikasi politik untuk menyampaikan pesan-pesan politik, mendengar tentang keluhan, dan permasalahan yang ada pada rakyat. Hubungan ini menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi/komunikasi dengan semuanya sebagai refrensi diri guna melakukan sesuatu tindakan.

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan

Ada 25 program yang menjadi kebutuhan rakyat yang kami sebut 25 program pro rakyat, nah disini ee.. seorang calon harus mampu meyakinkan bahwa ketika terpilih nanti program yang di tawarkan program yang memang menjadi kebutuhan dasar daripada warga tulang bawang itu menjadi benar-benar akan di laksanakan.⁸¹

Dengan melakukan interaksi kepada masyarakat winarti menyerap apa saja yang menjadi permasalahan dan menjadi keinginan masyarakat, sehingga terbentuk 25 program unggulan yang menjadi visi misi winarti dalam memenangkan pemilukada di kabupaten Tulang Bawang. Dalam pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Winarti dapat unggul dengan perolehan 47.65%.⁸²

⁸¹ Winarti, Bupati Tulang Bawang, Wawancara Pribadi, 29 November 2018

⁸² Sumber Data KPU Kab. Tulang Bawang

winarti selaku bupati Tulang Bawang mengatakan

*tentang pilkada benar-benar bisa di terima oleh masyarakat terbukti mereka ee... 47.65% memilih program kita disamping figur saya yakin program juga menentukan kemenangan.*⁸³

Dalam sebuah kemenangan kandidat tidak terlepas dari sebuah komunikasi politik yang di lakukan baik kepada masyarakat maupun kepada petinggi partai guna menyampaikan pesan politik. Menurut Miriam Budiarjo, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*) dan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*) untuk di perjuangkan menjadi kebijakan public.

Siapapun yang menjadi komunikator politik perlu memiliki keahlian atau kemampuan menyampaikan pesan secara tepat. Setiap lapisan masyarakat tentu saja memiliki karakter masing-masing. Terlebih kalau bicara budaya yang sangat beragam, penyampaian pesan politik tidak lagi hanya persoalan teknis, tetapi juga bagaimana masyarakat yang sangat beragam itu dapat memahami substansi dari pesan politik yang di sampaikan komunikator. Dalam hasil penelitian yang penulis dapatkan terdapat 3 unsur utama dalam melakukan komunikasi yaitu: komunikasi media massa, organisasi dan interpersonal.

⁸³ Winarti, *Op. Cit.*,

A. Bentuk Komunikasi Politik Winarti Kepada Masyarakat.

1. Komunikasi Massa Winarti

Media masa di anggap memiliki peranan yang sangat unik dalam pembangunan politik karena memiliki suatu instrument teknologi yang independen dan produknya dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Di samping itu media massa menganggap diri sebagai perantara yang independent antara pemerintah dan publik.

Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Komunikasi massa menurut Ellizabteh-Noelle- Neuman, sebagaimana di kutip oleh Jalalludin Rakhmat adalah :

- (b) Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis.
- (c) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan.
- (d) Bersifat terbuka, artinya di tunjukkan kepada publik yang tidak terbatas.
- (e) Mempunyai publik yang secara geografis tersebar.

Dengan adanya media merupakan trobosan baru dan menjadikan langkah yang lebih efisien dalam menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan politik dan juga dapat lebih mudah mengenalkan kandidat kepada masyarakat, sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat mengetahui. Adanya media dapat meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Penyampaian pesan-pesan politik dapat di lakukan di berbagai macam tempat dan kondisi.

Menurut Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan:

*Eee... pada waktu itu yang kita lakukan adalah khususnya yang di media massa eee... memasang iklan dengan menampilkan visi dan misi dan dilengkapi dengan foto kita di media-media, seperti Koran, baliho, dan juga di radio. Yang tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas kita.*⁸⁴

Pemanfaatan media untuk mendongkrak popularitas mulai marak sejak pemilu 1999 dan semakin menguat pada pemilu 2004 hingga pemilu 2014 lalu. Segala kegiatan yang diangkat media bertujuan bukan hanya sebagai sarana publisitas, melainkan juga memengaruhi khalayak untuk memilihnya. Pemanfaatan media merupakan kebutuhan rasional dalam proses komunikasi politik dan merupakan aktivitas komunikasi massa. Bitner menyatakan bahwa komunikasi massa mengandung pesan yang di komunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang. Pandangan ini senada dengan Maletzke yang menyatakan bahwa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media massa yang mempunyai beragam bentuk.

Dalam proses komunikasi politik, media massa lebih berperan untuk memberi informasi, mendidik, menghubungkan, dan kontrol sosial. Media massa adalah alat untuk mengirim pesan kepada sejumlah orang (khalayak). Masyarakat menjadikan media sebagai sumber informasi politik yang acapkali menjadi referensi dalam bersikap dan berperilaku mengenai sebuah isu. Media dengan leluasa menjadi sumber pendidikan politik bagi sebagian besar masyarakat.

⁸⁴ Winarti, *Op. Cit.*,

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan:

*Kalo menurut saya yang sekarang jaman sudah jaman digital, kita pergunakan ee.. medsos tapi kita sampaikan hal yang baik dan benar lalu yaa, ketemu dengan masyarakat langsung walau tidak harus dengan pertemuan akbar itu lakukan itu, ee.. blusuan.*⁸⁵

Pendapat winarti ini sejalan dengan seperti yang di katakana oleh “Defleur dan Denis” komunikasi massa adalah suatu proses dimana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang di harapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara.

Dalam melakukan komunikasi massa Winarti menggunakan media luar ruang, seperti baleho dan spanduk. Media ini di anggap lebih mudah dan ekonomis di bandingkan dengan menggunakan media cetak. Selain itu menggunakan media internet karena media tersebut lebih mudah di akses oleh masyarakat umum.

Faktor geografis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi salah satu alasan kuat bagi kandidat untuk menggunakan media luar ruangan dalam kampanye politik untuk membentuk image. Media kampanye seperti baliho dan spanduk yang menggambarkan pasangan kandidat di anggap lebih efisien, karena dapat langsung di distribusikan hingga pemilihan terpencil.

Penulis melihat begitu berpengaruhnya media massa saat ini dalam memainkan peran untuk sebuah elektabilitas kandidat sehingga para

⁸⁵ Winarti, *Op. Cit.*,

kandidat berusaha untuk memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin. Selain lebih efisien dan juga dapat menghemat biaya, dengan cara ini memudahkan para kandidat mengenalkan diri dan menyampaikan visi misi. Tanpa harus bertemu dan bertatap langsung masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kandidat yang mencalonkan.

2. Komunikasi Organisasi Winarti

Organisasi terdiri atas unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dan lainnya yang mempunyai sifat terpenting komunikasi organisasi yakni penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi.

Jaringan komunikasi organisasi menggabungkan sifat-sifat saluran masa dan saluran interpersonal. terdapat jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda dalam politik, baik formal maupun informal. Kelompok formal meliputi partai politik dan berbagai organisasi kepentingan khusus, seperti serikat buruh, asosiasi perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, dan koalisi kebebasan wanita, sedangkan yang di maksud dengan kelompok informal adalah keluarga, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang semuanya memainkan peran penting dalam mengembangkan opini politik.

Dalam komunikasi organisasi terdapat dua type umum saluran komunikasi: saluran internal dan saluran eksternal, proses saluran komunikasi internal memiliki tiga aspek: *pertama*, orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan; *kedua*,

keputusan dan alasannya harus di sebarkan agar anggota-anggota organisasi melaksanakannya; *ketiga*, ada saluran-saluran untuk “pembicaraan ke organisasian”, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al Insyirah

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

Artinya : Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

Bedasarkan ayat tersebut, bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh putus asa karena di balik kesulitan ada kemudahan. Ulet adalah sifat yang harus di miliki. Orang ulet selalu mencari jalan keluar dalam memecah masalah. Tentu di sertai sabar dan tidak mudah putus asa.

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan:

Karena kemari kan kita melawan incumbent otomatis karena sudah wajar kalau beberapa organisasi sudah bergabung dengan incumbent, tapi saya tidak menyerah, saya tetap melakukan komunikasi dengan semua organisasi dengan baik dan saya fikir mereka welcome untuk kita.⁸⁶

Sesuai dengan ayat tersebut bahwasannya meskipun sudah beberapa organisasi telah bergabung dengan pasangan incumbent namun winarti tidak putus asa untuk tetap melakukan komunikasi kepada seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik guna tercapai tujuan yang di inginkan.

Winarti selaku bupati tulang bawang mengatakan

walaupun mungkin ada beberapa yang beda pilihan tetapi saya rasa mereka menjadi salah satu kesatuan bagaimana saya bisa

⁸⁶ Winarti, *Op. Cit.*,

*komunikasi baik pro maupun kontra saya berusaha untuk komunikasi.*⁸⁷

Robbins mengatakan organisasi adalah bentuk kerja sama yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kerja sama karena di dalamnya terbentuk jalinan, hubungan, relasi dan komunikasi antara sejumlah orang yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama atau yang berbeda-beda (subsistem) lalu membentuk sebuah sistem (berinterelasi satu sama lain) untuk memenuhi tujuan yang ideal konkrit yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan komunikasi kepada organisasi merupakan bagian dari strategi Winarti untuk mendapat lebih banyak dukungan.

3. Komunikasi Personal Winarti

Komunikasi personal ialah komunikasi yang terjadi antara dua orang, dan dapat berlangsung dengan dua cara yakni secara langsung (tatap muka) dan secara tidak langsung (menggunakan media). Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan

*Yaa saya melakukan interaksi dengan masyarakat ee... dengan bertemu dengan masyarakat ee, melakukan komunikasi di setiap titik yang saya ee.. kunjungi. Untuk menyerap aspirasi masyarakat.*⁸⁸

⁸⁷ Winarti, *Op. Cit.*,

⁸⁸ Winarti, *Op. Cit.*,

Dengan melakukan komunikasi personal bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mendengarkan apa yang di harapkan masyarakat kepada sosok pemimpinnya. Dengan melakukan komunikasi interpersonal winarti dapat lebih dekat dengan masyarakat yang akan di pimpinnya.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat komunikasi politik Winarti

1. Faktor Pendukung

Faktor pendorong merupakan faktor yang sangat penting karena faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan, pada faktor pendorong terdapat system yang dapat menjadi kunci keberhasilan dan sesuai dengan teori implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai.

a) Pengaruh *incumbent*

Incumbent adalah calon yang menduduki jabatan serupa sebelumnya. Pada konteks politik, *incumbent* di artikan sebagai *the holder of a political office*. Istilah ini di gunakan dalam pemilu untuk membedakan pertarungan antara pemegang jabatan dan bukan pemegang jabatan.

Dalam hal ini *incumbent* memiliki kelemahan yang mana dapat di manfaatkan oleh winarti untuk dapat memperoleh suara dan dukungan di antaranya:

- 1) Pada *mix marketing*, kandidat pasangan *incumbent* hanya melakukan strategi *promotion* dan *price*, strategi *product* tidak di lakukan dan

strategi *place* tidak maksimal. Kandidat pemenang pemilu kada melakukan strategi *product* dengan membuat 25 program unggulan yang meliputi semua aspek, dan *place* maksimal dengan mesin partai dan tim yang solid.

- 2) Pada strategi alternatif, kandidat pasangan *incumbent* hanya melakukan strategi penguatan dan konfrontasi dari empat strategi yang ada dalam strategi alternative, sedangkan strategi bujukan dan rasionalisasi tidak di terapkan. Kandidat pemenang pemilu kada melakukan konfrontasi yang lebih maksimal dengan menjelaskan program unggulan.⁸⁹

Ridwan selaku masyarakat kecamatan menggala mengatakan:

*ee. kami kecewa dengan hanan itu apa, karena mereka Cuma kasih janji saja. Ya, mana ada janji dia yang di tepati, bahkan malah ee, dua desa yang ada di dekat bawang latak itu malah di gusur sama dia terus di gunain untuk lahan tebu. Di situlah kami kecewa dengan hanan.*⁹⁰

Menurut penulis, pengaru *incumbent* yang sangat banyak kekurangan menjadi salah satu faktor untuk Winarti dapat lebih mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat, seperti pernyataan responden, kekecawaan dengan *incumbent* membuat mereka enggan memilih *incumbent*.

b) *Figure* Winarti

Faktor pendukung lain dalam kemenangan Winarti di Kabupaten Tulang Bawang tentunya di sebabkan oleh sosok Winarti itu sendiri.

⁸⁹

⁹⁰ Winarti, *Op. Cit.*,

Beliau sangat kooperatif dengan tim pemenangan beliau, sehingga apa-apa yang di jadwalkan oleh tim sukses akan selalu di penuhinya. Kedekatan Winarti dengan masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya. Hal ini tentu memberikan kemudahan untuk memperoleh simpati dan suara dari masyarakat. Beliau di kenal ramah dengan masyarakat dan tidak membedakan dalam bersosialisasi.

c) Bentuk visi, misi

Menurut Gaspersz, visi adalah suatu pernyataan menyeluruh mengenai gambaran ide yang ingin di capai oleh kandidat di masa yang akan datang, sedangkan definisi misi, masih menurut gaspersz, adalah suatu pernyataan mengenai konsep dan tujuan-tujuan yang bersifat strategis termasuk manfaat-manfaat yang di berikan kepada rakyat.

Menurut kuncoro, formulasi visi sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang di informasikan. Visi yang baik (*vision of suces*) dapat di definisikan sebagai “deskripsi tentang apa yang akan di capai organisasi setelah organisasi tesebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya.

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan

mewujudkan program ee.. pro rakyat dengan 25 program yang sudah tertuang dalam RPJMD yang sudah di sepakati oleh DPRD tugasnya adalah merealisasi itu dengan bergotong royong dengan semua terkait agar terwujud.⁹¹

Setiap seseorang yang ingin maju dalam organisasi maka harus memiliki visi misi yang jelas, sehingga kedepannya dapat menjadi lebih

⁹¹ Winarti, *Op. Cit.*,

baik. Dengan memiliki 25 program pro rakyat, winarti terbukti dapat terpilih menjadi Bupati Tulang Bawang. Dalam hal ini dapat dikatakan visi misi berpengaruh dan menjadi faktor pendorong yang sangat signifikan dalam kemenangan winarti khususnya dan umumnya para kandidat yang lain.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan suatu system, organisasi ataupun peraturan seolah di tarik mundur dan sulit untuk berkembang seakan perubahan kearah yang lebih maju adalah yang sangat sulit di lakukan dan faktor penghambat menjadi inisiator kegagalan utama dalam penerapan suatu peraturan. Di dalam penelitian ini ada tiga faktor pengahambat sebagai berikut :

a) Masyarakat

Masyarakat adalah faktor utama penghambat dalam melakukan komunikasi politik, seperti kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di Negara Indonesia belum merata dan tentu saja dari hal tersebut membuat tingkat elektualitas masyarakat berbeda-beda dan membuat masyarakat kurang mengerti apa yang si sampaikan oleh kandidat yang melakukan komunikasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tak jarang kurang peduli dengan tujuan dari para kandidat.

Menurut An-Nabhani mengatakan masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran, perasaan, serta system aturan yang sama. Dan terjadi interaksi antara sesama

karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.⁹²

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan:

*Saya fikir semua latar belakan bermacam macam ee... yang ada di tulang bawang termasuk bermacam-macam latar belakang pendidikan yaa kita yang harus bisa masuk ke semua linie jadi bagaimana kita bisa komunikasi.*⁹³

Dalam hal ini meski bermacam-macam latar belakang pendidikan masyarakat yang ada di kabupaten tulang bawang, Winarti berusaha melakukan komunikasi.

b) Letak geografis

Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan mukabumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumberdaya alamnya. Letak suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi, batas, bentuk dan luas.⁹⁴ Pada Kabupaten Tulang Bawang sebagian kondisi geografi secara topografis Kabupaten Tulang Bawang merupakan daratan rendah. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian tersebut dapat di simpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang beriklim panas. Ketinggian ini adalah ketinggian yang cocok untuk budidaya tanaman karet. Dari penjelasan tersebut bahwa letak geografis di Kabupaten Tulang Bawang hampir sebagian lokasi terdapat banyak

⁹² An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003). H, 58

⁹³ Winarti, *Op. Cit.*,

⁹⁴ R Bintarto, dan Hadi Sumarno Surastopo, *Metode Analisa Geografi*, (LP3SES : Jakarta, 1986), h. 30

kebun, dengan begitu lokasi tempuh ada beberapa kecamatan yang berada di pedalaman dengan akses yang sangat sulit untuk di lalui. Dengan infrastruktur yang sangat memadai sangatlah berat bahkan untuk menuju dusun dusun tertentu memerlukan cukup waktu yang lama. Dengan kondisi geografis seperti ini mempengaruhi dalam melakukan komunikasi karena kurang efisien dalam penyampaian pesan politik yang di harapkan. Namun persoalan tersebut berusaha di atasi dan winarti tetap melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang bisa di jangkau.

Winarti selaku Bupati Tulang Bawang mengatakan:

Kalau rentan kendali pastilah ada hambatan lah yaa, tapi karena kita memang harus menjadi tanggung jawab kita 151 kampung dengan 4 kelurahan saya rasa ee ini menjadi salah satu dinamika yang asik aja dengan niat yang ee... bulat ya kita lakukan tetap semua harus di sapa setiap kampong saya masuk kesana, agar bisa menyerap dengan maksimal.

Persoalan tentang infrastruktur menjadi hambatan yang sangat signifikan, seperti akses pembangunan yang kurang merata dan masih terdapat akses jalan yang sangat sulit di lewati merupakan suatu kendala yang di hadapi oleh winarti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Winarti pada pemilu di Kabupaten Tulang Bawang, yang pertama, melakukan komunikasi massa, dengan melakukan komunikasi massa merupakan langkah yang efisien untuk meningkatkan elektabilitas Winarti dalam pemilu, dengan menggunakan media massa, seperti internet, brosur, spanduk dll, dengan begitu masyarakat mampu mengenali siapa Winarti. Yang kedua, melakukan komunikasi organisasi, dengan melakukan komunikasi organisasi merupakan langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan basis massa dan pendukung yang diharapkan, yang ketiga, melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat, dengan melakukan komunikasi interpersonal kepada masyarakat Winarti dapat menyerap aspirasi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, setelah mendengar aspirasi masyarakat Winarti menuangkan dalam visi misi yang disebut 25 program pro rakyat, yang terbukti dapat memenangkan Winarti dalam pemilu di Kabupaten Tulang Bawang.

B. SARAN

Bedasarkan kesimpulan yang di uraikan di atas, sebagai penutup dalam skripsi ini di ajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Ibu Winarti selaku Bupati Tulang Bawang, agar tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat, tetap mendengar aspirasi masyarakat, melaksanakan 25 program pro rakyat yang sudah di rencanakan, serta tetaplah menjadi seseorang pemimpin yang selalu melayani masyarakat, dekat dengan masyarakat.
2. Kepada masyarakat saling menjaga kerjasama dengan pemerintah untuk mengawasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Agar Kabupaten Tulang Bawang lebih baik, dan lebih maju baik dari segi infrastruktur maupun pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu, Cholid Narbuko, 1997 *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- An-Nabhani, Taqiyyuddin, 2003, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah
- Azra, Azumardi, Komaruddin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bungin, M. Burhan, 2006, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Cangara, Hafied, 2011, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, Dan Strategi, Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers
- Darmawan, Ikhsan, 2005, *Mengenal Ilmu Politik* Jakarta : Buku Kompas
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Firmazah, 2010, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hasan, M, Iqbal, 2002, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghali Indonesia
- Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumar, 2013, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Irtanto, 2008, *Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kamarul, Rambe Zaman, 2016, *Perjalanan Perjuangan Pilkada Serentak*, Jakarta : PT. Mizan Publika
- Kencana, Inu Syafiie, , 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Liliweri, Alo, 2014, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara

- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mufid, Muhammad, 2005, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Arni, 2005, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Rakhmat, Jalalludin, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta : PT Mizan Publika
- Rivai, Veithzal, Deddy Mulyadi, 2012, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Romli, Khomsahrial, 2011, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Jakarta : Grasido
- Saeful, Asep Muhtadi, 2008, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sony, Toman Tambunan, 2015, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sumradi Suryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Syarifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tabroni, Roni, 2012, *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Tjenreg, Zubakhrum, 2016 *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Depok : Pustaka Kemang
- Uchyana, Onong Effendy, 2003, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, 2001, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara

Wahid, Umaimah, 2016, *Komunikasi Politik*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media

B. Dokumentasi

Sumber: Data KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang pemilu 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

C. Jurnal

Fitri Yanti, “*Komunikasi Politik Dan Politik Komunikasi Suatu Relasi Dan Peran Media Massa*”. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 5/No. 3 (Januari-Juni 2007)

Iwan Setiawan, Andi Saputra, *Faktor-Faktor Kemenangan Incumbent dalam PILKADA*, Jurnal KONSTITUSI, Vol, III, No 1, Juni 2010)